

# BOS DAN PENGGUNAANNYA PADA SMP NEGERI DI KOTA BANDA ACEH

Oleh: Drs. Amiruddin, M.Pd

## ABSTRAK



BOS yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu. Oleh karena itu perlu dilaksanakan dengan baik agar mutu pendidikan dapat meningkat secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap BOS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data digunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini berjumlah 25 orang. dengan rincian masing-masing sekolah diambil 2 orang guru, 1 orang bendahara BOS, 1 orang ketua Komite Sekolah dan 1 orang Kepala Sekolah. Hasil penelitian adalah Perencanaan penyusunan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh berpedoman pada: Buku KAS umum (format-K3), Buku Pembantu KAS tunai (format-K4), Buku pembantu Bank (format-K5) dan Buku pembantu Pajak (format-K6). Pelaksanaan dan implementasi pengelolaan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh bervariasi yaitu program: penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi, pembelian buku teks, kegiatan kesiswaan, biaya ulangan harian/umum, pembelian barang habis pakai, biaya listrik, air dan telepon, piaya perawatan sekolah, honorium guru honor/PTT, pelatihan guru MGMP/MKKS, transportasi siswa miskin, pembelian ATK, dan kegiatan menyusun perangkat pembelajaran. Pengawasan terhadap penggunaan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh yang bersifat internal seperti pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Pengawasan eksternal terhadap penggunaan dana BOS seperti pengawasan yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

**Kata Kunci :** BOS dan Penggunaannya

## **Latar Belakang Masalah**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berpengaruh kepada seluruh sendi kehidupan umat manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia, baik yang tinggal dipinggiran maupun di perkotaan. Untuk mengimbangi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi perlu adanya upaya konkrit dari pemerintah yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mandiri masyarakat Indonesia, dengan kata lain diperlukan adanya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini perlu dipahami karena tidak menutup kemungkinan jika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi serta perdagangan bebas berpengaruh serta mengakibatkan hal yang negatif kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan memperak porandakan bangsa Indonesia. Karena itu kemungkinan besar bangsa Indonesia hanya akan menjadi objek, tempat pemasaran atau jadi buruh murah bagi bangsa lain yang sudah lebih dulu menguasai IPTEK.

Proses pendidikan melalui jalur sekolah itu bisa berjalan baik guna tercapainya tujuan yang telah digariskan, maka perlu didukung dari berbagai pihak terkait, karena keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: sarana/prasarana, SDM dan biaya yang cukup menentukan, karena semua faktor lain pada dasarnya akan terkait dan tergantung pada kesediaan biaya. Anwar, (1990:50) menegaskan bahwa “Setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya“

Kebutuhan biaya pendidikan diperhitungkan dengan akurat dan matang, sehingga akan dapat ditentukan jumlahnya, sumber biaya, pengalokasian, penggunaan sampai pada proses pertanggung jawabannya. Hal itu dimulai dengan penyusunan rencana penerimaan dan penggunaan biaya secara akurat dan matang, sehingga akan tercipta prinsip efektif dan efisien. Kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila kepala sekolahnya berfungsi sebagai manajer yang memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan manajemen sekolah.

Kepala Sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan serta kaitannya dengan kebutuhan biaya yang akan menunjang terlaksananya rencana kerja tersebut. Bahkan dalam manajemen modern dikemukakan bahwa ada 3 ciri yang tidak boleh dilupakan dalam pengelolaan suatu lembaga, yaitu adanya perencanaan yang akurat, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Rencana anggaran yang biasa digunakan di sekolah adalah dengan sistem penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) setiap tahunnya. Hasil penyusunan RAPBS dapat menentukan jumlah biaya yang diperlukan, sumber biaya, perkiraan besar biaya yang diperoleh, rincian penggunaan biaya sampai pada cara pertanggung jawaban, evaluasi dan peng administrasiannya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana digambarkan di atas maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan oleh karena itu pemerintah telah menempuh berbagai upaya peningkatan mutu yang salah satunya melalui bantuan operasional sekolah. Program bantuan oprasional ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka

memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Dana bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu. Sejak tahun pelajaran 2005/2006 pemerintah Indonesia mengalihkan sebagian dari subsidi BBM untuk program pendidikan, selain itu merupakan bantuan untuk memenuhi sebagai biaya operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sasaran dari bantuan operasional sekolah adalah semua sekolah tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. BOS dan peningkatan mutu pendidikan diperlukan manajemen berbasis sekolah yang transparan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan bisa secara periodik/rutin atau incidental apabila diperlukan.

Pelaksanaan dana BOS melibatkan banyak unsur seperti kepala sekolah, guru, siswa dan komite sekolah terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program peningkatan mutu sekolah baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Dinas pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkewajiban melakukan workshop sebelum dimulai implementasi kegiatan dan melakukan monitoring untuk memberikan bimbingan dan arahan demi tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik serta pengawasan yang ketat agar mutu pendidikan dapat meningkat, akhirnya melaksanakan evaluasi program untuk melihat tingkat keberhasilan sehingga dapat diputuskan apakah sekolah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dana BOS tahun berikutnya.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan adalah

1. Bagaimana perencanaan penyusunan pembiayaan bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perencanaan penyusunan pembiayaan bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan pembiayaan bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh.

### **Manfaat Penelitian**

Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat untuk Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama sebagai program wajib belajar 9 tahun melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik serta pengawasan yang ketat, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi : Penulis sendiri dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang masalah pelaksanaan dana BOS sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pihak terkait, sebagai bahan masukan, untuk memerapkan kebijakan bantuan operasional sekolah yang lebih efektif dan

efisien, dan Para komponen sekolah baik yang telah atau yang belum menerima dana bantuan operasional sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program dan pengelolaan dana BOS yang tepat sasaran untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

### **Konsep Dasar Bantuan Operasional Sekolah**

Biaya satuan pendidikan merupakan besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaanya biaya satuan pendidikan dibedakan menjadi investasi dan operasional.

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumberdaya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot, dan alat kantor. Sedangkan biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. (Buku Panduan BOS tahun 2007)

Biaya satuan pendidikan operasional mencakup biaya personal dan biaya non personal. Biaya personal meliputi biaya untuk kesejahteraan honor kelebihan jam mengajar, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, Uang lembur dan pengembangan profesi guru pendidikan dan latihan guru, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, dan lain-lain. Biaya non personal adalah biaya untuk penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personal yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

Bantuan operasional sekolah secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personal dan biaya investasi. Perlu ditegaskan bahwa prioritas utama dana BOS untuk biaya operasional non personal bagi sekolah. Oleh karena itu keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah/madrasah/pondok pasantren dan kesejahteraan guru dibiayai dari pemerintah daerah.

#### *1. Sekolah penerima BOS adalah :*

- a. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah/madrasah/pondok pasantren swasta harus memiliki ijin operasional. Sekolah/madrasah/pondok pasantren yang bersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
- b. Sekolah kaya/mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah/madrasah/pondok pasantren penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah. Bila di sekolah/ madrasah/pondok pasantren yang mampu tersebut terdapat siswa miskin, sekolah/madrasah/pondok pasantren tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut (misalnya melakukan subsidi silang dengan dana dari siswa yang mampu).

#### *2. Ketentuan yang Harus Diikuti Sekolah Penerima BOS*

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Apabila di sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah/madrasah/pondok pasantren diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/sumbangan/iuran seluruh mensubsidi siswa lain. Dengan demikian sekolah/madrasah/ponpes tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila dana BOS cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah/madrasah/ponpes, maka otomatis sekolah/madrasah/pondok pasantren tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan gratis.
- b. bagi sekolah/madrasah/pondok pasantren yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah/madrasah/pondok pasantren.

### 3. Program BOS dan Program Wajar Dikdas 9 Tahun yang Bermutu

Dalam rangka penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun.
2. melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.
3. anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahalny biaya masuk sekolah.
4. kepala sekolah/madrasah/ponpes mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

### **Penggunaan Dana BOS**

Penggunaan dana BOS di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dan komite sekolah atau madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS. Di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (Blockgrant, hasil unit produksi, sumbangan lain dan lain-lain).

1. Penggunaan:
  - a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru : Biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.

- b. Pembelian Buku Teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan
- c. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olah raga, kesenian dan karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa.
- f. pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- g. pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, membeler dan perawatan lainnya.
- h. pembiayaan langganan daya dan jasa : listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. pembayaran honorarium bulanan guru nonorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
- j. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transpor dari dan ke sekolah
- k. khusus untuk pasantren salafiyah dan sekolah salafiah dan sekolah keagamaan non Islam, dana dapat digunakan biaya asrama atau pondokan dan membeli peralatan ibadah.
1. pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan penggandaan surat menyurat dan penyusunan laporan
2. Dana Tidak Boleh digunakan untuk :
  - a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
  - b. dipinjamkan kepada pihak lain
  - c. membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid
  - d. membangun gedung/ruangan baru.
  - e. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  - f. menanamkan saham
  - g. membiayai segala kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/ mencukup dari sumber dana pemerintah atau daerah, misalnya guru kotran/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

### 3. Pembatalan BOS

Dalam hal sekolah penerima BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS atau tutup/bubar, maka bantuan dibatalkan dan dana BOS harus distorkan kembali ke kas negara. TIM PKPS – BBM kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan sekolah penerima BOS.

### 4. Pengawasan Dana BOS

Pengawasan terhadap penggunaan dana BOS yang bersifat internal (warga sekolah) dan juga bersifat eksternal yaitu pihak di luar satuan sekolah. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana BOS. Menurut Panduan pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

- Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

- Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

- Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

- Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS.

- Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008, mengamanatkan bahwa: (1) Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat. (2) Pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.

Pengawasan penggunaan dana BOS sangat ketat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat dan masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Hal ini dilaksanakan agar penggunaan dana BOS sesuai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan

sekolah bertaraf internasional (SBI) dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, hal ini dilakukan untuk memberikan makna yang mendalam dan agar dapat melihat fenomena yang ada saat sekarang. Sasaran penelitian diarahkan pada usaha menguasai teori-teori dasar penelitian yang bersifat deskripsi, dengan mementingkan penguasaan proses penelitian, membatasi studi dengan fokus kajian, menentukan kriteria untuk memeriksa keabsahan data dan hasil penelitian bisa diterima serta dibenarkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak peneliti dan yang teliti.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan kococokan konsep penelitian dengan konsep yang ada pada responden. Untuk mencapai hal tersebut dalam penelitian ini dilakukan triangulasi, yaitu mengecek kebenaran data dengan membandingkan dengan data dari sumber lain. Hasil dari wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi tentang penggunaan dana BOS. Penggunaan bahan referensi digunakan untuk mengamankan berbagai informasi yang didapatkan di lapangan yang telah dijawab oleh responden dengan baik. Mengadakan member check, setiap jawaban atau pembahasan suatu topik diusahakan untuk menyimpulkan secara bersama, sehingga perbedaan persepsi dalam suatu masalah dapat dihindarkan, juga dilakukan konfirmasi dengan pembimbing terhadap laporan hasil wawancara, sehingga apabila ada kekeliruan dapat diperbaiki.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua warga sekolah SMP Negeri di Kota Banda Aceh. Mengingat populasi homogen dan banyak maka penulis menetapkan 5 SMP Negeri sebagai sampel yang berjumlah 25 orang dengan rincian masing-masing sekolah diambil 2 orang guru, 1 orang bendahara BOS, 1 orang ketua komite sekolah dan 1 orang kepala sekolah, menurut penulis sampel ini sudah terkili dari semua populasi.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah 5 SMP Negeri yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu SMP Negeri 2 Banda Aceh, SMP Negeri 4 Banda Aceh, SMP Negeri 6 Banda Aceh, SMP Negeri 9 Banda Aceh, dan SMP Negeri 18 Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2008.

### **Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen yang digunakan untuk memperoleh sejumlah data di lapangan adalah observasi, wawancara dan studi dokumenter.

### **Teknik Analisis Data**

Karakteristik dalam penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan di atas berlangsung secara induktif dan berjalan secara terus menerus. Dengan kata lain, analisis data ini dilakukan dalam suatu proses. Proses ini berarti pelaksanaannya sudah dimulai sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif lagi sesudah meninggalkan lapangan. (Moleong, 1990:104). Analisis data ini dilakukan dengan mengikuti proses sebagaimana disarankan oleh Nasution (1988:130), yaitu: (1) reduksi data, (2) *display* data, dan (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,



lalu diklasifikasikan menurut variabel penelitian ini. Hal-hal yang pokok atau penting yang berkenaan dengan fokus penelitian adalah penggunaan dana BOS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh

Selanjutnya, hal-hal praktek tersebut dirangkum dalam susunan yang lebih sistematis sehingga dapat mudah diketahui tema atau polanya. Pekerjaan ini disebut sebagai *display* data. Hal-hal yang tampak dalam *display* data itu dapat ditarik kesimpulan sehingga data yang terkumpul mempunyai makna tertentu. Untuk memantapkan kesimpulan, dilakukan verifikasi dengan *member check* atau *triangulasi*. Ketika data telah terkumpul, dilakukan verifikasi kemungkinan ada data yang tertinggal dapat dengan segera disempurnakan. Begitu pula setelah diambil kesimpulan, juga dilakukan verifikasi untuk melihat tujuan penelitian itu sudah tercapai atau belum tercapai.

### **HASIL PENELITIAN**

SMP Negeri 2 Banda Aceh tahun ajaran 2008 mempunyai sebanyak 679 orang siswa, alokasi dana yang disediakan Rp 329.483.300. Dana BOS tersebut digunakan untuk kegiatan: 1) PSB (5,96 %), 2) kegiatan remedial ( 51,13 %), 3) kegiatan ulangan (3,56 %); 4) bahan habis pakai (5,05%), 5) perawatan sekolah (6,50%), 6) membayar GTT (9,02), 7) Pengembangan Profesi (5,45%) dan 8) bantuan siswa miskin (13,35 %).

SMP Negeri 4 Banda Aceh tahun 2008, mempunyai 326 orang siswa dengan alokasi dana yang tersedia Rp 113.280.000 yang digunakan untuk 1) pengadaan Buku Paket (4,42%), 2) pelatihan (10,59%) 3) bahan Pakai Habis (10,59%), 4) kegiatan kesiswaan (47,56%), 5) biaya transport (12,71 %), 6) pengadaan bahan Lab (4,42 %), 7) Biaya Perawatan Ringan (5,29 %) dan 8) biaya Pengelolaan BOS (4,42 %)

SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun ajaran 2008 sebanyak 751 orang siswa, alokasi dana yang disediakan Rp 373.053.600. Dana BOS tersebut digunakan untuk kegiatan: 1) Penerimaan siswa baru (1,79 %), 2) Pembelian buku referensi (2,58 %), 3) Pembelian Buku Teks (2,22%), 4) kegiatan kesiswaan (33,79%), 5) Biaya ulangan harian/umum (7,97%), 6) Pembelian barang habis pakai (4,07%), 7) Biaya listrik, air dan telepon (1,05%), 8) Biaya perawatan sekolah (4,76%), 9) Honorium guru honor/PTT (14,47%), 10) Pelatihan guru MGMP (7,28%), 11) Transpoatsi siswa miskin (14,47 %), 12) Pembelian ATK (3,53%) 13) MKKS (0,48 %) dan 14) Perangkat Pembelajaran (1,44%).

SMP Negeri 9 Banda Aceh tahun 2008, mempunyai 244 orang siswa dengan alokasi dana yang tersedia Rp 80.389.000 yang digunakan untuk: 1) Pengeyaan Siswa Kelas III (sore) (26,38%), 2) Try Out (5,67 %), 3) Kesenian (10,73%), 4) Pramuka (7,96%), 5) Keagamaan (3,89 %), 6) Pelaksanaan Ujian (13,02%), 7) Penerimaan Siswa Baru (4,22%), 8) Pembelian Buku (4,22%), 9) MGMP dan MKKS (11,82%), 10) Perawatan Sarana (3,82%), 11) Pembelian Barang Habis Pakai (0,85%) 12)Pelaporan dan Pengelolaan BOS (5,35%), 13) Olah Raga (2,64%).

SMP Negeri 18 Banda Aceh tahun ajaran 2008 sebanyak 355 orang siswa, alokasi dana yang disediakan Rp 145.150.000. Dana BOS tersebut digunakan untuk kegiatan: 1) Bayar Hornor guru Honorer (9,64%), 2) Ujian Semester (11,73%), 3) Kegiatan OSIS (9,64%), 4) Ujian Bersama MKKS Kelas IX (10,35%), 5) Iuran MKKS SMP (1,65%), 6) Rehab Sarana Sekolah (13,77%), 7) Pelaksanaan PSB siswa Baru (2,58%), 8) Jam Tambahan Sore hari Kelas IX ( 15,15%), 9)

Try Out Bersama (10,34%), 10) Honor Penjaga Sekolah (8,27%) dan 11) Kegiatan Keagamaan (6,88%).

Hasil observasi, wawancara dan dokumenter diperoleh keterangan bahwa implementasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh bervariasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat data yang tertera dalam tabel berikut.

*Tabel 1. Tentang Penggunaan Dana BOS*

Sekolah	Jlh Murid	Besarnya BOS	PENGUNAAN DANA BOS		
			Urutan I	Urutan II	Urutan III
SMP N 2	679 orang	Rp 329.483.300	kegiatan remedial/ pengayaan	Bantuan siswa miskin	Membayar honor GTT
SMP N 4	326 orang	Rp 113.280.000	Kegiatan kesiswaan	Traspor siswa miskin	Pelatihan guru
SMP N 6	751 orang	Rp 373.053.600.	Kegiatan kesiswaan	Traspor siswa miskin	Membayar honor GTT/PTT
SMP N 9	244 orang	Rp 80.389.000	Pengayaan Siswa Kelas III (sore)	Pelaksanaan ujian	Kegiatan Kesenian
SMP N 18	355 orang	Rp 145.150.000	Pengayaan Siswa Kelas IX (sore)	Perbaikan sarana sekolah	Ujian semester

Data yang tertera dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan dana BOS antara sekolah yang satu dengan yang lainnya bervariasi SMP Negeri 2 lebih mengutamakan kegiatan remedial/pengayaan, bantuan untuk siswa miskin dan membayar honorer guru tidak tetap. SMP Negeri 4 Banda Aceh lebih dominan penggunaan dana BOS untuk kegiatan kesiswaan, transpor siswa miskin dan pelatihan guru. SMP Negeri 6 Banda Aceh lebih dominan penggunaan dana BOS untuk kegiatan kesiswaan, transpor siswa miskin dan membayar honorer guru tidak tetap. SMP Negeri 9 Banda Aceh lebih mengutamakan kegiatan pengayaan siswa kelas III (sore), pelaksanaan ujian dan kegiatan kesenian. SMP Negeri 18 lebih dominan penggunaan dana BOS untuk kegiatan pengayaan siswa kelas IX (sore), perbaikan sarana sekolah dan ujian semester.

Pengawasan terhadap penggunaan dana BOS yang bersifat internal seperti pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

Pengawasan eksternal terhadap penggunaan dana BOS seperti pengawasan yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS.

### **Kesimpulan**

1. Perencanaan penyusunan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Banda Aceh berpedoman pada 1) Buku KAS umum (format-K3), 2) Buku Pembantu KAS tunai (format-K4), 3) Buku pembantu Bank (format-K5) dan 4) Buku pembantu Pajak (format-K6)

2. Pelaksanaan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Banda Aceh bervariasi yaitu program 1) Penerimaan siswa baru, 2) Pembelian buku referensi, 3) Pembelian Buku Teks 4) kegiatan kesiswaan, 5) Biaya ulangan harian/umum, 6) Pembelian barang habis pakai, 7) Biaya listrik, air dan telepon, 8) Biaya perawatan sekolah, 9) Honorium guru honor/PTT, 10) Pelatihan guru MGMP, 11) Transpoatsi siswa miskin, 12) Pembelian ATK, 13) MKKS dan 14) Perangkat Pembelajaran.
3. Pengawasan terhadap penggunaan bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri di Banda Aceh yang bersifat internal seperti pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Pengawasan eksternal terhadap penggunaan dana BOS seperti pengawasan yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

#### **Saran-saran**

1. Program bantuan operasional sekolah sangat menentukan dalam kelangsungan pendidikan pada SMP, maka program tersebut hendaknya dapat ditingkatkan.
2. Mengingat pelaksanaan bantuan operasional sekolah bervariasi antara satuan pendidikan yang satu dengan lainnya, oleh karena itu diharapkan kepada para kepala sekolah dapat melaksanakan dengan baik.
3. Dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu hendaknya para kepala sekolah dapat mengadakan kerja sama secara terpadu dengan pihak terkait untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Adikusumo ( 2000) *Manajemen Pola Terpadu*, Lembaga Administrasi RI
- Amir Abadi Jusuf dan Floyd A.Beams. (2004). *Akuntansi Keuangan*. Edisi Revisi,Buku 1. Salemba Empat
- Brigham dan Houston. (2006). *Foundamentals of Financial Management (Dasar-dasar Manajemen Keuangan)*.Edisi 10,Buku 1.Salemba Empat.
- Depdiknas (2000) *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Didasmen
- (2000) *Panduan Manajemen Sekolah*, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Umum
- (1999) *Program dan kebijakan Strategis Penungkatan Mutu Pendidikan Bandung*, Kandepdikbud Kota Bandung
- (2007) *Buku Panduan Bantuan Oprasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, Departemen pendidikan Nasional Departemen Agama.
- (2007) *Panduan Peminaan Sekolah Potensial menjadi Sekolah Standar Nasiomnal (SSN) Untuk SMP*, Depdiknas
- H.A.R. Tilaar ( 2000) *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Rinaka Cipta Jakarta
- Hutapea, Aris, (1999), *Manajemen kebijaksanaan Operasional*, Bandung Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat
- Miftah Thoah (2000) *Perilaku Organisasii Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

- NitiseMITO S. Akex, dkk. (2004). *Wawasan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek*. Edisi Revisi. Bumi Aksara.
- Nanang Fatah (2000) *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosda Karya Bandung
- Usry Carter. (2005). *Akuntansi Biaya*. Edisi 13, Buku 2.. Salemba Empat
- Sutopo (2000) *Administrasi Manajemen dan Organisasi*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

## BIODATA PENULIS

### A. Identitas diri

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : Drs. Amiruddin, M. Pd  |
| 2. NIP              | : 132221013  |
| 3. Pangkat/Golongan | : Penata Tk I/III.d  |
| 4. Jabatan          | : Widyaiswara Muda   |
| 5. Unit Kerja       | : LPMP NAD   |
| 6. Tempat/Tgl Lahir | : Mns. Garut, 1 Agustus 1965   |
| 7. Alamat           | : Jl. Al-Hikmah No. 109 Komplek Bukit Indah Desa Gue Gajah<br>Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar<br>Telepon Rumah : (0651) 43166 HP. 08126908035<br>E-Mail : <a href="mailto:arsul_lpmp@yahoo.com">arsul_lpmp@yahoo.com</a> dan<br><a href="mailto:amiruddinsulaiman86@yahoo.com">amiruddinsulaiman86@yahoo.com</a> |



### B. Pendidikan

1. MIN No. 2 Peudada, berijazah tahun 1979
2. M.Ts Peudada, berijazah tahun 1982
3. SMA Peudada, Berijazah tahun 1985
3. 4. S1 FKIP Unsyiah Jurusan IPS/PPKn, berijazah 1990
5. S2 FKIP Unsyiah Jurusan Manajemen Pendidikan, berijazah tahun 2004

### C. Pekerjaan

1. Guru Bakti pada SMA Adidarma Banda Aceh dari tahun 1990 s.d 1996
2. Guru Bakti pada SMA YPTP Banda Aceh dari tahun 1994 s.d 2006
3. Guru Bakti pada SMA Negeri 1 Banda Aceh dari tahun 1995 s.d 1998
4. Guru Bakti pada SMA Modal Bangsa dari tahun 1996 s.d 2002
5. Dosen tidak tetap pada APIKES dan ATRO dari tahun 2000 s.d sekarang
6. Guru Negeri SMP Negeri 6 Seulimeum Aceh Besar dari tahun 1999 s.d 2002
7. Guru Negeri SMA Modal Bangsa dari tahun 2002 s.d 2006
8. Menjadi Widyaiswara pada LPMP NAD 26 Juli 2006 s.d sekarang

### D. Diklat yang pernah diikuti

1. Instruktur PPKn di Malang tahun 1999
2. Instruktur IMTAK di Cipayung tahun 2000
3. Instruktur Budi Pekerti di Cipayung tahun 2000
4. TOT Widyaiswara berjenjang di LPMP Sumatera Utara tahun 2005
5. TOT Pembekalan Widyaiswara di LPMP Riau tahun 2006
6. TOT tentang SI dan SKL di LPMP Sumatera Barat tahun 2006
7. TOT Bahasa Inggris di Bandung tahun 2006
8. TOT Kesadaran Berkonstitusi di Jakarta tahun 2007
9. TOT Tentang KKG dan MGMP di Bandung tahun 2007
10. ToT Tentang Reviu Modul Prajabatan Golongan I, II dan III di Pusdiklat Jakarta tahun 2008
11. ToT Tentang KTI On line di Bandung tahun 2008
12. ToT Tentang Reviu Modul Pembinaan Kepala Sekolah dan Pengawas di Jakarta tahun 2008

### E. Karya Tulis

1. Modul tentang Meteri Kewarganegaraan SMA tahun 1998
2. Lomba Karya Tulis IMTAK Juara I tingkat Nasional tahun 2000
3. LKS Kewarganegaraan SMA tahun 2003
4. Bahan Ajar Kewarganegaraan tahun 2003
5. Modul tentang Kewarganegaraan tahun 2005
6. Modul tentang Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tahun 2007
7. Forum Ilmiah Widyaiswara dan Tenaga Fungsional BP-PLSP Tingkat Nasional tahun 2007
8. Sebagai juara Nasional II dalam lomba Penulisan Naskah Buku Pengayaan yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan Jakarta 2007 dengan judul Peningkatan Iman Dan Takwa Serta Daya

Saing Bangsa Melalui Meteri Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA , Kelompok Non Fiksi  
Jenis Pengayaan Pengetahuan Sosial.

9. Forum Ilmiah Widyaiswara dan Tenaga Fungsional BP-PLSP Tingkat Nasional tahun 2008
10. Lomba Penulisan Naskah Buku Pengayaan yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan Jakarta 2008 dengan judul Peningkatan Iman dan Takwa Serta Daya Saing Bangsa Melalui Meteri Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, Klp Non Fiksi Jenis Pengayaan Pengetahuan Sosial.
11. Juara I KTI dalam Rangka Mengikuti Loka Karya se-Sumatera di Lampung thn 2009

Banda Aceh, 10 Juni 2009

Drs. Amiruddin, M. Pd